



Modal Sosial dan Keterlibatan Pemerintah Dalam Penyediaan Barang Publik : Studi Penarikan Amal Untuk Masjid di Desa Prajekan Kidul Kabupaten Bondowoso

Andika Dwi Nurliansyah*, Emy Kholifah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso. Penelitian dilatarbelakangi oleh kuatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas keagamaan yang menunjukkan adanya kepercayaan, jaringan sosial, dan nilai gotong royong di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap pengurus masjid, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penarikan amal periode 2006–2013. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid. Selain itu, pemerintah desa berperan melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu mendukung penyediaan barang publik berbasis partisipasi masyarakat secara efektif.

Kata Kunci : Modal Sosial; Keterlibatan Pemerintah; Barang Publik; Pembangunan Masjid; Penarikan Amal.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i3.6080>

*Correspondence: Andika Dwi

Nurliansyah

Email: dwnrandika24@gmail.com

Received: 05-05-2026

Accepted: 05-06-2026

Published: 05-07-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : This study aims to analyze social capital and government involvement in the provision of public goods through charitable fundraising for the construction of Al-Arief Mosque in Prajekan Kidul Village, Bondowoso Regency. The study is motivated by strong community participation in developing religious facilities, reflecting trust, social networks, and mutual cooperation within the community. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, literature review, and documentation involving mosque administrators, village officials, and local residents who participated in fundraising activities during the 2006–2013 period. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques. The findings reveal that trust, social norms, and social networks are the main factors encouraging community participation in mosque construction. In addition, the village government contributes through coordination, supervision, and support for community activities. This study concludes that collaboration between the community and the government effectively supports community-based public goods provision.

Keywords : Social Capital; Government Involvement; Public Goods; Mosque Construction; Charity Fundraising.

Pendahuluan

Pembangunan fasilitas publik di tingkat desa tidak selalu bergantung pada kemampuan pemerintah semata. Dalam berbagai kegiatan pembangunan, masyarakat sering kali menunjukkan partisipasi yang tinggi melalui gotong royong, sumbangan, maupun bentuk kerja sama lainnya. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong tindakan kolektif dan penyediaan kebutuhan bersama ([Santoso, Prof Thomas M, 2020](#), [Kharisma et al., 2021](#); [Alfiansyah, 2023](#); [Suriyani, 2025](#)).

Dalam perkembangan administrasi publik kontemporer, penyediaan barang publik tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai hasil interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan publik semakin bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kompleksitas permasalahan publik, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel ([Ansell & Gash, 2007](#)); ([Emerson & Woo, n.d.](#)). Dalam konteks tersebut, modal sosial menjadi salah satu sumber daya yang penting karena mampu membangun kepercayaan (*trust*), memperkuat jaringan sosial (*social networks*), serta membentuk norma bersama (*shared norms*) yang mendorong tindakan kolektif dalam penyediaan barang publik ([Gaebler et al., n.d.](#))

Salah satu bentuk penyediaan barang publik yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan fasilitas keagamaan, khususnya masjid. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat ([Hidayanti & Wasilah, 2023](#); [Fauziyah & Abdy, 2025](#)). Keberadaan masjid memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara bersama ([Mardi, 2024](#); [Fathori, 2025](#); [Hidayat et al., 2025](#)). Keberadaan dan pembangunan masjid di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaturan pemerintah mengenai pendirian rumah ibadah ([Fauzul Kabir & Wahyu Trisno Aji, 2025](#)). Oleh karena itu, pembangunan masjid tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus atau pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai bentuk swadaya dan gotong royong ([Bakara et al., 2024](#); [Mainingsih, 2024](#); [Alfiansyah, 2023](#)); [Waluyo, 2022](#); [Brown et al., 2021](#)).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid tidak terlepas dari adanya modal sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Kepercayaan, jaringan sosial, dan nilai gotong royong menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam memenuhi kebutuhan bersama ([Nonci et al., 2024](#); [Nst & Fahlevi, 2021](#); [Aziz, 2025](#)). Kondisi tersebut banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang erat sehingga kegiatan berbasis swadaya dapat berjalan dengan baik ([Emy Kholifah, 2025](#); [Fahmi & Panorama, 2025](#)).

Fenomena tersebut dapat dilihat pada pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Pembangunan masjid ini dilakukan melalui praktik penarikan amal yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam

pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan data Kecamatan Prajekan Dalam Angka Tahun 2024, masyarakat Kecamatan Prajekan masih memiliki hubungan sosial yang kuat dan kehidupan berbasis komunitas yang mendukung tumbuhnya kegiatan gotong royong ([BPS, 2024](#)). Selain partisipasi masyarakat, pemerintah desa juga terlibat melalui pemberian dukungan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat ([Seepma & Donk, 2020](#)).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis komunitas melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang mendukung tindakan kolektif (Alfiansyah, 2023). Namun demikian, penelitian tersebut lebih banyak menyoroti peran modal sosial masyarakat, sedangkan keterlibatan pemerintah dalam membangun dan memfasilitasi kolaborasi penyediaan barang publik masih belum banyak dibahas. Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan penyediaan barang publik tidak hanya ditentukan oleh kuatnya modal sosial masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai aktor ([Ansell & Gash, 2007](#)).

Praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana modal sosial dan keterlibatan pemerintah dapat saling mendukung dalam penyediaan barang publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun oleh masyarakat dalam kegiatan penarikan amal ([Creswell & Creswell, 2018](#); [Moleong, 2014](#); [Sugiyono, 2016](#)).

Lokasi penelitian berada di Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengetahuan mengenai proses pembangunan masjid dan kegiatan penarikan amal. Informan penelitian terdiri atas kepala yayasan masjid, ketua takmir, pengurus yayasan, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penarikan amal pada periode 2006–2013 ([Arikunto, 2002](#); [Dr. Emy Kholifah R. & Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., 2025](#)).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka ([Zed, 2008](#)). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penarikan amal, bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat, serta keterlibatan pemerintah dalam pembangunan masjid. Dokumentasi digunakan untuk

melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Al-Arief.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ([Miles et al., 2014](#)). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan informasi dari berbagai informan ([Sugiyono, 2016](#)).

Hasil dan Pembahasan

Diskripsi Lokasi Penelitian (Profil Desa)

Desa Prajekan Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan nilai kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi sosial yang masih kuat. Interaksi sosial yang erat antarmasyarakat tercermin dalam berbagai kegiatan kolektif, seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, dan pembangunan fasilitas umum. Kehidupan keagamaan juga berlangsung aktif, dengan masjid dan musholla yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat.

Desa Prajekan Kidul dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya menunjukkan keterlibatan aktif dalam pembangunan Masjid Al-Arief melalui praktik penarikan amal. Kegiatan tersebut mencerminkan adanya modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan semangat gotong royong yang didukung oleh keterlibatan pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan koordinasi. Karakteristik tersebut menjadikan Desa Prajekan Kidul relevan sebagai lokasi untuk mengkaji modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui pembangunan masjid (BPS, 2024).

Sarana Prasarana Desa

Berdasarkan data tahun 2023, Desa Prajekan Kidul telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, meliputi jaringan listrik, transportasi darat, komunikasi, serta fasilitas ekonomi seperti perbankan, koperasi, pasar, dan minimarket. Kondisi tersebut mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi di desa.

Selain berfungsi sebagai penunjang aktivitas masyarakat, sarana dan prasarana desa juga mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ketersediaan fasilitas umum memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, berkoordinasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, termasuk kegiatan penarikan amal dan pembangunan Masjid Al-Arief. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang tersedia turut mendukung terbentuknya partisipasi masyarakat dalam penyediaan barang publik.

Sarana Prasarana Keagamaan.

Desa Prajekan Kidul memiliki sarana prasarana keagamaan yang terdiri atas 5 masjid, 45 musholla, dan 1 gereja. Keberadaan fasilitas tersebut mendukung pelaksanaan

kegiatan ibadah sekaligus menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar keagamaan, secara rutin dilaksanakan di fasilitas tersebut sehingga memperkuat hubungan sosial antarwarga. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan sarana keagamaan menjadi salah satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan Masjid Al-Arief melalui kegiatan penarikan amal.

Temuan dan Analisa Data

Norma (*Norms*) Sosial dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Penarikan Amal

Norma sosial menjadi salah satu unsur modal sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Norma tersebut tercermin melalui kepatuhan terhadap nilai keagamaan, kebiasaan bersedekah, tradisi gotong royong, dan dorongan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Prajekan Kidul, menyumbang untuk pembangunan masjid dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial untuk memenuhi kepentingan bersama.

"Pernah menyumbang, saya ingin melihat jika masjid sudah berdiri dari hasil sumbangan masyarakat dan semoga menjadi pahala jariyah." (Muhammad Dirlie Fernando).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan menjadi motivasi utama masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela. Selain didorong oleh ajaran agama, partisipasi juga telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

"Kalau di sini memang sudah kebiasaan, kalau ada pembangunan masjid ya warga ikut membantu, minimal menyumbang semampunya." (Fitri Musdalifah)

Kebiasaan tersebut diperkuat oleh tradisi gotong royong yang masih terpelihara. Masyarakat tidak hanya memberikan sumbangan berupa uang, tetapi juga tenaga dan material sesuai kemampuan masing-masing.

"Donatur utama pembangunan masjid adalah masyarakat. Ada yang menyumbang genteng, semen, dan kebutuhan lainnya. Pembangunan ini ada karena masyarakat." (H. Supriyadi)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga menghasilkan tindakan kolektif yang memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pengurus masjid, dan pemerintah desa. Dalam perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) kepatuhan terhadap nilai keagamaan, kebiasaan bersedekah, dan tradisi gotong royong menjadi modal sosial yang membangun kepercayaan dan komitmen bersama dalam penyediaan barang publik. Sementara itu, pemerintah desa berperan sebagai *enabling government* dengan memberikan dukungan administratif, memfasilitasi koordinasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kolaborasi tersebut berjalan secara efektif.

Jaringan Sosial yang saling mendukung pembangunan masjid

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berperan dalam memperkuat hubungan antarmasyarakat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Hubungan yang erat tersebut

memudahkan penyebaran informasi, koordinasi, serta mobilisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan penarikan amal. Kedekatan sosial antarmasyarakat menjadikan informasi mengenai kegiatan pembangunan masjid dapat tersebar dengan cepat melalui komunikasi sehari-hari.

Salah satu informan menyampaikan bahwa:

"Kalau ada kegiatan seperti penarikan amal itu biasanya cepat diketahui warga, karena sudah saling kenal dan sering komunikasi, jadi informasinya cepat menyebar." (Bapak Adi Purnomo)

Selain hubungan antarmasyarakat, jaringan sosial juga melibatkan pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Pengurus masjid berperan membangun komunikasi dengan masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat membantu menyampaikan informasi dan menggerakkan partisipasi warga. Pemerintah desa turut mendukung melalui koordinasi agar kegiatan penarikan amal berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan berikut:

"Kami dari desa biasanya bantu ngatur saja biar kegiatannya tetap lancar dan tidak mengganggu." (Bapak Adi Purnomo)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial tidak hanya mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Dalam perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), hubungan yang terjalin antara masyarakat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa membentuk proses kolaborasi yang didasarkan pada komunikasi, kepercayaan, dan tujuan bersama. Sementara itu, keterlibatan pemerintah desa dalam memberikan dukungan administratif dan koordinasi menunjukkan pelaksanaan fungsi *enabling government*, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyediaan barang publik.

Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan (*trust*) merupakan unsur modal sosial yang berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat pada kegiatan penarikan amal pembangunan Masjid Al-Arief. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan dana, kredibilitas pengurus masjid, serta keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat cenderung lebih bersedia berpartisipasi apabila meyakini bahwa dana yang disumbangkan dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai tujuan pembangunan masjid.

Salah satu informan menyampaikan bahwa:

"Kadang masyarakat ingin tahu juga uangnya dipakai untuk apa saja, biar jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan." (Ibu Amsiyana)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kedekatan sosial antara masyarakat dengan pengurus masjid turut memperkuat rasa percaya sehingga masyarakat lebih yakin untuk memberikan sumbangan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan lain:

"Kalau sama pengurus ya percaya saja, soalnya sudah kenal juga orangnya." (Ibu Ani)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun melalui keterbukaan pengelolaan dana, tetapi juga melalui hubungan sosial yang telah terjalin antara masyarakat dan pengurus masjid. Dalam perspektif modal sosial, kepercayaan menjadi dasar terbentuknya kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kepercayaan tersebut mendorong masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela sehingga memperkuat proses *collaborative governance* dalam penyediaan barang publik. Di sisi lain, pemerintah desa turut mendukung terciptanya kepercayaan melalui fungsi *enabling government*, yaitu dengan memberikan dukungan administratif serta menjaga koordinasi agar pelaksanaan penarikan amal berlangsung tertib dan akuntabel.

Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Barang Publik

Peran pemerintah dalam penyediaan barang publik pada pembangunan Masjid Al-Arief diwujudkan melalui keterlibatan, dukungan, dan fasilitasi terhadap kegiatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan partisipatif serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak berperan sebagai pelaksana utama pembangunan masjid, melainkan memberikan dukungan melalui koordinasi, pendampingan, serta kemudahan administratif agar kegiatan penarikan amal dapat berjalan dengan tertib. Salah satu informan menyatakan:

"Dari pihak desa itu ada yang ikut juga, bahkan dulu mantan kepala desa pernah ikut bantu waktu pembangunan, jadi tidak hanya masyarakat saja yang terlibat." (Bapak H. Supriyadi)

Selain terlibat dalam beberapa kegiatan pembangunan, pemerintah desa juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menginisiasi pembangunan secara mandiri. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan fasilitasi sehingga kegiatan masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.

"Kami dari desa biasanya bantu dari sisi koordinasi saja, biar kegiatannya tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah." (Bapak Adi Purnomo)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan fungsi *enabling government*, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif tanpa mengambil alih peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Dalam perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membangun komunikasi, koordinasi, dan dukungan terhadap kolaborasi antara masyarakat, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, masyarakat tetap menjadi penggerak utama melalui kontribusi tenaga, material, maupun dana yang dihimpun melalui penarikan amal.

Penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief berakhir pada tahun 2013 setelah pembangunan utama masjid selesai. Namun, partisipasi masyarakat tetap berlanjut

melalui sumbangan sukarela untuk pengembangan fasilitas masjid, seperti perbaikan tempat wudhu, pengadaan pendingin ruangan (AC), dan penambahan fasilitas lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang telah terbentuk selama proses pembangunan mampu menjaga keberlanjutan penyediaan barang publik melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso. Kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat secara sukarela dalam mendukung pembangunan masjid. Nilai keagamaan dan budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat turut memperkuat keberhasilan penggalangan dana dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, keterlibatan pemerintah desa melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu mendukung penyediaan barang publik berbasis partisipasi masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, penguatan modal sosial dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dipertahankan dan dikembangkan untuk mendukung penyediaan berbagai barang publik lainnya di tingkat lokal.

Referensi

- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10, 41–51.
- Alley, J. (2025). Reassessing the public goods theory of alliances. June. <https://doi.org/10.1177/20531680211005225>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aziz, M. (2025). Fiqh Discourse on Water: Integrating Social Capital and Mosque-Based Charity through Concurrent Triangulation. 21(2), 217–230. <https://doi.org/10.7176/jlpg/99-09.1>
- Bakara, S., Wulandari, M., Lubis, E. H., Nasution, A. R., Maulana, J., Rahmi, S. N., & Simanungkalit, J. (n.d.). Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. *K J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- BPS. (2024). Kecamatan Prajekan Dalam Angka 2024.

- Brown, P. R., Cherney, L., Warner, S., Brown, P. R., Cherney, L., Warner, S., Brown, P. R., Cherney, L., & Warner, S. (2021). Understanding Public Value – Why Does It Matter? *Understanding Public Value – Why Does It Matter? International Journal of Public Administration*, 44(10), 803–807. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1929558>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Emy Kholifah. (2025). Patronase dalam Pemerintahan Desa: Antara Tradisi dan Modernisasi. *GANESHA KREASI SEMESTA*, OKTOBER 2025.
- Fahmi, R. A., & Panorama, M. (2025). Strengthening the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Sumatra through Islamic social entrepreneurship. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art1>
- Fathori, F. (2025). Memaksimalkan Distribusi Keuangan Sosial Islam Dan Pengentasan Kemiskinan; Bukti Dari Masjid Di Indonesia. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 547–560. <https://doi.org/10.32806/currency.v4i1.900>
- Fauziyah, N., & Abdy, K. (2025). Repositioning Mosques as Centers for Islamic Socio-Economic Empowerment: Lessons from the Jogokariyan Mosque in Indonesia. 5(December), 159–175.
- Fauzul Kabir, & Wahyu Trisno Aji. (2025). Masjid dalam Kitab Suci Negara: Pendirian Masjid dalam Peraturan Pemerintah Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 335–358. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.634>
- Gerlak, A. K., Heikkila, T., & Lubell, M. (2012). The promise and performance of collaborative governance.
- Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2013). Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. *Public Administration Review*, 73(6), 821–830.
- Hidayat, R., Rodoni, A., & Sukardi, B. (2025). Transforming Mosque Sustainability: Leveraging Islamic Economics and Finance for Community Empowerment. 16(2), 313–334. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.2.28314>
- Hildayanti, A., & Wasilah. (2023). Influence of mosque transfiguration based on the development period in Indonesia. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(2), 72–84.

- Kharisma, B., Remi, S. S., & Wardhana, A. (2021). Social Capital, Internet Use and Poverty in West Java Province. *22(1)*, 60–73. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.13025>
- Kholifah, E., & Widagdo, S. (2025). *Metodologi Penelitian Sosial*. Mandalas Press.
- Mainingsih, S. (n.d.). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat. *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah*.
- Mardi, Moh. (2024). Peran Masjid Dalam Pengembangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economic and Islamic Research*, *3(1)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nonci, N., Maidin, R., & Abdullah, S. (2024). Modal Sosial Dalam Masyarakat Desa Luhu.
- Nst, W. R., & Fahlevi, M. R. (2021). Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Aceh Utara. *7(September)*, 74–84.
- Santoso, Prof Thomas M, S. (2020). *Memahami Modal Sosial*.
- Seepma, A. P., & Donk, D. P. V. A. N. (2020). On Publicness Theory and Its Implications for Supply Chain Integration: The Case of Criminal Justice Supply Chains. *University of Groningen*, 1–32. <https://doi.org/10.1111/jscm.12245>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriyani. (2025). Smart Society: Community Service and Empowerment Journal Revitalizing the Social Role of Urban Mosques: A Case Study of the Jum'at. *5(2)*, 233–249.
- Torring, J., & Ansell, C. (2017). Strengthening political leadership and policy innovation through the expansion of collaborative forms of governance. *Public Management Review*, *19(1)*, 37–54.
- Waluyo, J. (2022). *BAHAN AJAR EKONOMI PUBLIK I: SURAT PENCATATAN*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.